

## Menteri Dibatasi Berpolitik

Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono akan membatasi menteri kabinet periode 2009-2014 aktif berpolitik agar fokus menjalankan tugas di pemerintahan.

"Kita pastikan pemerintahan baru harapan saya lebih efektif, fokus pada tugasnya, tidak boleh banyak berpolitik tapi harus bekerja," kata SBY dalam konferensi pers usai menghadiri rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Pittsburgh, Amerika Serikat, Jumat (25/9) malam atau Sabtu (26/9) pagi waktu Indonesia.

SBY juga membuat aturan agar setiap menteri bisa mencapai target yang dibuat. Bersama Wakil Presiden terpilih Boediono, SBY juga telah melakukan evaluasi kinerja pemerintahan lima tahun pertama. Dan dirinya telah merampungkan perkiraan rencana strategis lima tahun mendatang dengan menetapkan sejumlah tujuan baru.

Mengenai kabinet baru, SBY mengatakan belum menyusun formasinya. Namun ia menekankan kabinet yang akan datang akan berorientasi pada hasil (output).

"Karena keterbatasan tempat nanti tentu saya minta pengertian kalau dari sekian ratus yang ingin mengabdikan, tidak semua bisa bersama-sama," kata SBY.

### Lebih Memilih Profesional

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, Pratikno menilai keinginan SBY membatasi menteri berpolitik merupakan sinyal bahwa SBY akan memperbanyak kaum profesional dalam struktur kabinet mendatang. Namun, menurutnya, kalangan profesional tersebut bisa saja juga dari partai politik.

"Presiden lebih melihat keahlian dari calon menteri tersebut, ketimbang posisinya dalam partai politik," kata Pratikno dihubungi Jurnal Nasional, Minggu (27/9).

Menurut Pratikno, melalui pernyataannya tersebut, SBY ingin meneguhkan sistem presidensial, sesuai dengan konstitusi yang dianut Indonesia. "SBY ingin memperkuat posisinya sebagai kepala pemerintahan dan sebagai komandan kabinet," katanya.

Dalam pemerintahan sebelumnya, kata Pratikno, masih ada keragu-raguan mengenai sistem presidensial akibat banyaknya partai politik yang harus diakomodasi. Kini, dengan kuatnya legitimasi SBY sebagai hasil pemilihan presiden lalu, menjadikan penguatan sistem presidensial menemukan momentum tepat.

Untuk menjamin dan memantapkan pernyataan tersebut, menurut Pratikno, pemerintahan mendatang harus memuat jelas kontrak kinerja antara Presiden dengan para menternya serta ada mekanisme yang jelas dan transparan bagi Presiden untuk menilai, mengevaluasi dan memonitoring kinerja menternya.

Melalui kontrak kinerja dan mekanisme evaluasi tersebut, lanjut Pratikno, bila suatu saat ada menteri yang diberhentikan ditengah jalan oleh Presiden, masyarakat tidak menilainya sebagai suatu manuver politik dari Presiden. "Kan sudah jelas kontrak kinerja dan mekanisme evaluasinya," katanya.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia Andrinof Chaniago juga berpendapat pernyataan SBY menegaskan agar para calon menteri yang kelak terpilih tidak menduduki jabatan pengurus partai politik, baik sebagai sekretaris jenderal maupun ketua umum. "Paling mungkin sebagai penasihat atau majelis pertimbangan partai saja," katanya.

Menurutnya, pernyataan Presiden tersebut tidak diartikan bahwa SBY akan lebih memilih kalangan profesional dalam struktur kabinet mendatang. "Presiden tetap akan mengakomodasi kalangan partai politik, namun menteri yang dipilih diminta untuk segera melepaskan jabatannya di parpol dan konsentrasi pada tugas pemerintahan," katanya.

Ia juga berpendapat, kontrak kinerja dan mekanisme evaluasi yang transparan merupakan cara yang tepat bagi SBY untuk mengikat menteri agar tercurah perhatiannya pada tugas-tugas pemerintahan.

Andrinof memperkirakan pernyataan SBY tersebut dilatarbelakangi hasil evaluasi atas kinerja para menteri di kabinet sebelumnya.

"Ada beberapa menteri yang menghabiskan anggaran besar namun hasilnya tidak nyata karena perhatiannya juga tersita untuk partai politiknya," katanya.

Sumber : [jurnalnasional.com](http://jurnalnasional.com)